

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan dalam pemberdayaan masyarakat nelayan melalui program Pro Gakin dengan menggunakan pendekatan kelembagaan seperti Koperasi Nelayan dan Kelompok Usaha Bersama atau KUB Nelayan di Kecamatan Batang Kapas. Tujuan dan target program Pro Gakin adalah meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui peningkatan pendapatan nelayan dan peningkatan partisipasi menabung masyarakat nelayan. Dalam penelitian ini Dinas Perikanan secara umum memiliki peran sebagai regulator, fasilitator, koordinator, dan *entrepreneur* merujuk pada peraturan Bupati No 32 Tahun 2015 terkait fungsi Dinas Perikanan dalam pemberdayaan nelayan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari teori implementasi, konsep peran, dan pemberdayaan masyarakat. Hasil dari penelitian adalah peran Dinas Perikanan dalam pemberdayaan nelayan melalui program pro gakin belum optimal. Hal ini terlihat pada ketimpangan kegiatan pemberdayaan seperti kegiatan penyuluhan perikanan, akses sarana dan prasarana pada kelompok nelayan, pendampingan kelompok, dan kegiatan pengolahan perikanan sebagai sumber ekonomi alternatif. Kondisi ini menyebabkan target dari program Pro Gakin untuk meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan di atas UMR Kabupaten Pesisir Selatan belum dapat dicapai secara optimal.

Kata Kunci : Peran Dinas Perikanan, Pemberdayaan Nelayan, dan Pro Gakin

## **ABSTRACT**

This research aims to describe the role of Fisheries Department of South Pesisir District in the empowerment of fishermen communities through Pro Gakin program using institutional approaches such as fishermen groups in Batang Kapas Subdistrict. The goal and target of Pro Gakin program to improve the welfare of fishermen through increased fishermen's income and increase the participation of saving. In this study, the Fisheries Department generally has the role of regulator, facilitator, coordinator, and entrepreneur referring to the rule of Regent No. 32 year 2015 related to the Fisheries Department function in the empowerment of fishermen. The method used in this research is a qualitatively descriptive method. The theories and concepts used in the study consist of implementation theories, role concepts, and community empowerment. The result of the study was the role of Fisheries Department in the empowerment of fishermen through the program Pro Gakin not optimal. This is evident in the inequality of empowerment activities such as fishery extension activities, access to facilities and infrastructure in the group of fishermen, mentoring groups, and fishery processing activities as an alternative source of economy. This condition causes the target of Pro Gakin program to increase the revenue of fishermen communities above the Regional Minimum Wage of South Pesisir District has not been achieved optimally.

**Keywords:** Role of Fisheries Department, Community Empowerment, and Pro Gakin